

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2018 meliputi Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Humas dan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat beberapa kecamatan dan kelurahan.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 telah mengalokasikan dana sebesar **Rp24.390.134.658,00** atau 1,18% dari total alokasi APBD Tahun 2018 yang berjumlah **Rp2.072.393.505.735,00**. Alokasi untuk Trantibum Linmas ini dapat terealisasi sebesar **Rp23.004.540.960,00** atau 94,32%. Program dan alokasi anggaran urusan Trantibum Linmas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.B.5.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2018

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
A	Belanja Langsung	15.008.768.950	14.398.676.773	95,94
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.372.720.450	1.230.425.399	89,63
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	982.092.500	949.604.604	96,69
3	Program peningkatan disiplin aparatur	250.000.000	246.232.000	98,49
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	350.000.000	349.490.600	99,85
5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.285.288.500	3.250.666.070	98,94
6	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	290.000.000	257.847.000	88,91
7	Program pengembangan wawasan kebangsaan	2.732.900.000	2.679.269.560	98,04
8	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	595.000.000	532.734.500	90
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.020.000.000	923.354.300	91
10	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	315.000.000	305.265.600	97
11	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.725.767.500	1.610.341.200	93
12	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	2.090.000.000	1.973.444.900	94

IV.B.5. **Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
B	Belanja Tidak Langsung	9.381.365.708	8.605.864.187	
	Belanja Pegawai	9.381.365.708	8.605.864.187	91,73
Jumlah Total		24.390.134.658	23.004.540.960,00	94,32

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2018(diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kantor Satpol PP, Kesbangpol, dan BPBD melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah; Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan; Penyelesaian Pekerjaan Kantor; dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini untuk meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat khususnya urusan trantibum dan linmas melalui kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor; serta Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3) Program peningkatan disiplin aparatur

Dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional maka dilaksanakan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi anggota Satpol PP.

4) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Untuk memantapkan perilaku masyarakat dalam menciptakan kondisi aman, sehat rapi dan indah maka telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain : Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pengendalian Keamanan Lingkungan, Fasilitasi PAM Pemilihan Kepala Daerah, Patroli Wilayah, Fasilitasi PAM Tamu/ Pejabat (Asing, Pusat dan Daerah).

Sosialisasi Deradikalisasi dan Pendataan Radikal Kanan/ Radikal Kiri merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai gerakan radikal dan sebagai upaya pencegahan dan

menangkal bibit radikalisme di lingkungan masyarakat sehingga terwujud lingkungan yang aman dan kondusif serta selalu menjaga persatuan dan kesatuan demi tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai wujud antisipasi terjadinya konflik sosial di Kabupaten Wonosobo dan sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Kantor Kesbangpol telah melaksanakan kegiatan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang berpotensi terjadinya konflik sosial di masyarakat serta untuk pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan konflik sehingga terwujudnya kondisi masyarakat aman, tentram, tertib dan teratur.

5) Program pengembangan wawasan kebangsaan

Pembangunan wawasan kebangsaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu:

- Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bela Negara, meningkatkan rasa patriotisme, rasa cinta tanah air dan bangsa dalam kebhinekaan dan persatuan sehingga dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui Forum Ceramah Wawasan Kebangsaan dan Forum Diskusi Wawasan Kebangsaan sebagai wujud untuk memantapkan rasa cinta tanah air dan bangsa, demokrasi, rasa persatuan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan demi tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ceramah wawasan kebangsaan diikuti oleh elemen dari PKK Kabupaten dan PKK Desa, wali murid TK, IPNU/ IPPNU Wonosobo, Anggota KAPA Kabupaten Wonosobo, guru dan siswa SMP 1 Garung, SMP Kristen, SMP 1 Wonosobo, SMP 1 Kertek, SMP 2 Wonosobo, SMP 1 Mojotengah dan SMA Kristen serta calon TKI.
- Pendidikan Kader Bela Negara (PKBN) yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran bela negara di kalangan pelajar SLTA sehingga tumbuh rasa patriotisme, rasa cinta tanah air dan bangsa, rasa persatuan dan kesatuan, terbentuknya karakter bangsa dalam jiwa generasi muda yang unggul yang siap menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Ziarah Kebangsaan yang bertujuan untuk mewujudkan pemahaman akan arti perjuangan para tokoh pendiri kabupaten wonosobo sehingga generasi muda dapat meneladani dan mewarisi sifat-sifat serta nilai-nilai perjuangan para pendiri Wonosobo serta dapat melanjutkan perjuangan mereka dalam

mengisi dan memajukan Wonosobo khususnya dan bangsa Indonesia.

- Peringatan Hari-Hari Besar Nasional, Fasilitas Hari Jadi Wonosobo dan HUT Kemerdekaan RI merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memupuk dan memelihara integritas bangsa maupun daerah sebagai wujud kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial budaya pada hakekatnya ditujukan pada terciptanya kondisi masyarakat yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Wonosobo sebagai bagian integral bangsa Indonesia yang memiliki wawasan satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air Indonesia yang mampu berperan aktif dan mandiri dalam pembangunan.

6) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Salah satu wujud pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan melalui kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Persuasif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pembinaan dan operasi yustisi dan non yustisi yang dilaksanakan pada mulai bulan Januari-Desember 2018, peningkatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kemungkinan adanya pelanggaran perda, penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran perda /peraturan lain yang dilakukan oleh masyarakat ataupun lembaga, sosialisasi peraturan perda dan perundang undangan lainnya, peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS Satpol PP, membangun pola kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait lainnya dalam penegakan perda, pembinaan dan penertiban PKL, operasional penertiban spanduk/ *banner* yang melanggar ketentuan dan pengamanan pejabat, unjuk rasa, aset, serta pengamanan kegiatan lainnya

Tanggung jawab masalah keamanan ini tidak hanya terletak pada pemerintah namun juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat. Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan kriminalitas menumbuhkan kebijakan untuk senantiasa meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat.

7) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis kondisi Kabupaten Wonosobo memiliki potensi terjadi bencana alam. Untuk meminimalisir korban dan dampak negatif dari bencana yang terjadi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang dijabarkan dalam kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam berupa pengadaan kendaraan siaga bencana, ambulance dan peralatan pemadam kebakaran. Tahun 2018 telah dilaksanakan Operasi Tanggap Darurat Bencana antara lain bencana tanah longsor 57 Kejadian, bencana Angin puting beliung jumlah 14 Kejadian, bencana banjir 9 Kejadian, kebakaran sebanyak 34 kejadian.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap resiko bencana kepada masyarakat telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu Penguatan Desa Siaga

Bencana dengan menyelenggarakan workshop pengembangan Desa Siaga Bencana di Desa Damarkasian Kecamatan Kertek. Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran.

Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan Berbasis Masyarakat juga telah dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem peringatan dini bencana. Selain itu pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi siswa dan guru di daerah rawan bencana sebagai upaya untuk mewujudkan Program SMAB (Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) diselenggarakan di 3 sekolah yaitu SD Wonoroto Watumalang, SMP 1 Leksono dan SMP 1 Kalikajar.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rapor Ketangguhan Bencana, Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor, Fasilitasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops), Review penyusunan rencana kontijensi Gunung Api Sindoro.

8) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Kegiatan yang dilakukan antara lain : Optimalisasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), Validasi data Ormas dan LSM, Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siswamkarsa di Daerah dan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Masyarakat.

9) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan mempedomani instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba.

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang terinci dalam beberapa kegiatan yaitu Fasilitasi Kesatuan Aksi Masyarakat Anti Narkotika (KAMA) dan Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkotika (KAPA) dan Penyuluhan Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Miras dan Narkoba (P4GN) bertujuan untuk memberikan pemahaman/pengetahuan tentang bahaya narkoba dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba demi terciptanya generasi muda yang terbebas dari pengaruh narkoba.

Untuk menurunkan tingkat kenakalan remaja dan pelajar di wilayah Kabupaten Wonosobo maka dilakukan kegiatan Penanggulangan dan Pembinaan Kenakalan Anak, Remaja dan Pelajar dengan melaksanakan operasi gabungan dengan Tim Penanggulangan Kenakalan Remaja dengan menyasar lokasi antara lain, tempat hiburan, taman, warnet, rental play station, hotel, losmen, tempat karaoke, villa, rumah kos, cafe dan tempat wisata pada jam sekolah atau malam hari.

10) Program pendidikan politik masyarakat

Dalam rangka meningkatkan persentase pemilih maka diselenggarakan kegiatan Peningkatan dan Penguatan Partisipasi Politik, Fasilitas Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah, Pembinaan politik bagi Pemuda, Bintek Keuangan Parpol, Sosialisasi Undang-Undang Pemilu, Kajian Perilaku Politik Masyarakat Wonosobo Terhadap Undang-Undang Pemilu, Fasilitas Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Politik dan Fasilitas Desk Pemilu, Pembinaan politik bagi pemuda dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik bagi pemuda khususnya bagi pemilih pemula, seperti dari kalangan siswa SMA/SMK. Sedangkan Bintek Keuangan Parpol dilaksanakan bagi Pengurus dan Anggota Parpol yang menerima bantuan keuangan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan bagi Pengurus dan Anggota Parpol yang menerima bantuan keuangan. Sosialisasi Undang-Undang Pemilu dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

c. Capaian Kinerja

Tabel III.B.5.2
Capaian Kinerja Urusan Trantibum dan Linmas berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian 2017	Target RKPD 2018	Realisasi Capaian 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian 2018	Target (RPJMD) 2021
1	Tingkat partisipasi pemilih	%	72,92%	73,97%	72,92%	98,64	◇	75%
2	Prosentase kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan dan difasilitasi penyelesaiannya	%	5,00%	100%	100%	100	0	100%
3	Persentase siskamling aktif	%	50,00%	61%	80%	131,15	0	75%
4	Prosentase FKDM yang aktif	%	60,00%	73%	74%	101,37	0	85%
5	Persentase lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang telah berbadan hukum indonesia yang mendapat bantuan pemerintah daerah	%	50,00%	73%	83,33%	114,15	0	85%

IV.B.5. **Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian 2017	Target RKPD 2018	Realisasi Capaian 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian 2018	Target (RPJMD) 2021
6	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (jumlah tempat ibadah/jumlah penduduk)x1000		4,42	4,43	4,43	100,00	0	4,45
7	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	67,00%	90%	91%	101,11	0	90%
8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota	%	100,00%	100%	100%	100	0	100,00%
9	Angka kriminalitas yang tertangani		75,00%	85%	100%	117	0	85,00%
10	Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila) per 1.000 penduduk		0,025	0,005	0,105	0	Δ Δ Δ Δ	0,005
11	Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		7,460	0,34	0,913	268,53	0	0,4
12	Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota		4,4	1,35	0,9518	70	● ● ●	1,5
13	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		0,53	0,64	0,01	1,56	Δ Δ Δ Δ	0,74
14	Persentase		8,00%	25%	28,94%	115,76	0	40%

IV.B.5. **Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian 2017	Target RKPD 2018	Realisasi Capaian 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian 2018	Target (RPJMD) 2021
	LINMAS terlatih							
15	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		39,06	5,20	1,94	37,31	△ △ △ △	7,04%
16	Persentase desa siaga bencana	%	25,00%	40%	30%	75	● ● ●	75,00%
17	Persentase sekolah tanggap bencana		0,00%	85%	75%	88,23	◇	100%
18	Cpembentukan wilayah manajemen kebakaran (WMK) pada lingkungan dan atau kawasan potensi kebakaran		0	1	0	0,00	△ △ △ △	2
19	cakupan pelayanan bencana kebakaran		95,00%	94,5%	93,8%	99,26	◇	100%
20	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK		35,00%	50%	50%	100	⓪	75,00%

Sumber : Kantor Kesbangpol, Satpol PP, dan BPBD Kab. Wonosobo, 2018

Keterangan Status Capaian:

⓪	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $>80\%$ - $99,99\%$
● ● ●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
△ △ △ △	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Tingkat partisipasi pemilih pada tahun 2018 tidak mengalami perubahan dari capaian tahun 2017 yaitu 72,92% sehingga realisasi target capaian tahun 2018 adalah sebesar 98,64%. Sebagai wujud peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, persentase siskamling aktif tahun 2018 mengalami kenaikan 30% sehingga realisasi target capaian tahun 2018 telah terpenuhi. Selain itu prosentase FKDM yang aktif juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 60% dan tahun 2018 sebesar 74%. Capaian kinerja persentase lembaga keagamaan dan kemsyarakatan yg telah berbadan hukum Indonesia yang mendapat bantuan pemerintah daerah mencapai

IV.B.5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

83.33 % dari target yang ditetapkan sebesar 73,5 %. Lembaga keagamaan berbadan hukum yang mendapatkan bantuan dari pemerintah karena telah melaksanakan kegiatan- kegiatan dengan meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam bidang ketahanan ekonomi dan sosial serta meningkatkan partisipasi dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat beragama.

Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk pada tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi 0,01%. Turunnya rasio satpol PP terhadap jumlah penduduk disebabkan oleh adanya mutasi pegawai Satpol PP ke perangkat daerah lainnya dan memasuki masa pensiun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja maka jumlah minimal pegawai Satpol PP dari kabupaten/kota minimal pegawai sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai.

Persentase desa siaga bencana pada tahun 2018 mengalami kenaikan 5% dibandingkan dengan tahun 2017, namun capaian tersebut belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 40%. Kenaikan signifikan juga terjadi pada persentase SMAB (Sekolah/Madrasah Aman Bencana), pada tahun 2017 belum terdapat sekolah tanggap bencana, namun dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2018 capaian indikator persentase sekolah tanggap bencana sebesar 75% atau 88,23% dari target tahun 2018.

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel IV.B.5.3

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami perlunya kecintaan terhadap tanah air, pentingnya rasa persatuan, dan pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara	Penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan bagi masyarakat
2.	Kelompok-kelompok radikal selalu memanfaatkan situasi dan moment-moment tertentu untuk kepentingannya sendiri/ kelompoknya sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial	Penguatan kewaspadaan wilayah terhadap ancaman, hambatan, dan gangguan.
3.	Belum terpadunya pemahaman terhadap Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintahan	Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang melibatkan stakeholder terkait.
4.	Adanya keterbatasan letak geografis dan topografi yang potensial terhadap terjadinya bencana alam dan luasnya	Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan dibidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi

IV.B.5. **Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No.	Permasalahan	Solusi
	cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam menghambat kecepatan penyebaran arus data dan penanganan bencana	risiko-risiko bencana melalui pembentukan komunitas tanggap bencana
5.	Terbatasnya armada dan peralatan pemadam kebakaran (mobil pemadam) sehingga penanganan kebakaran kurang efektif	Mengajukan usulan pengadaan armada baru
6.	Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat Wonosobo
7.	Masih adanya kelompok masyarakat yang tidak mengindahkan adanya Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah secara persuasif kepada masyarakat